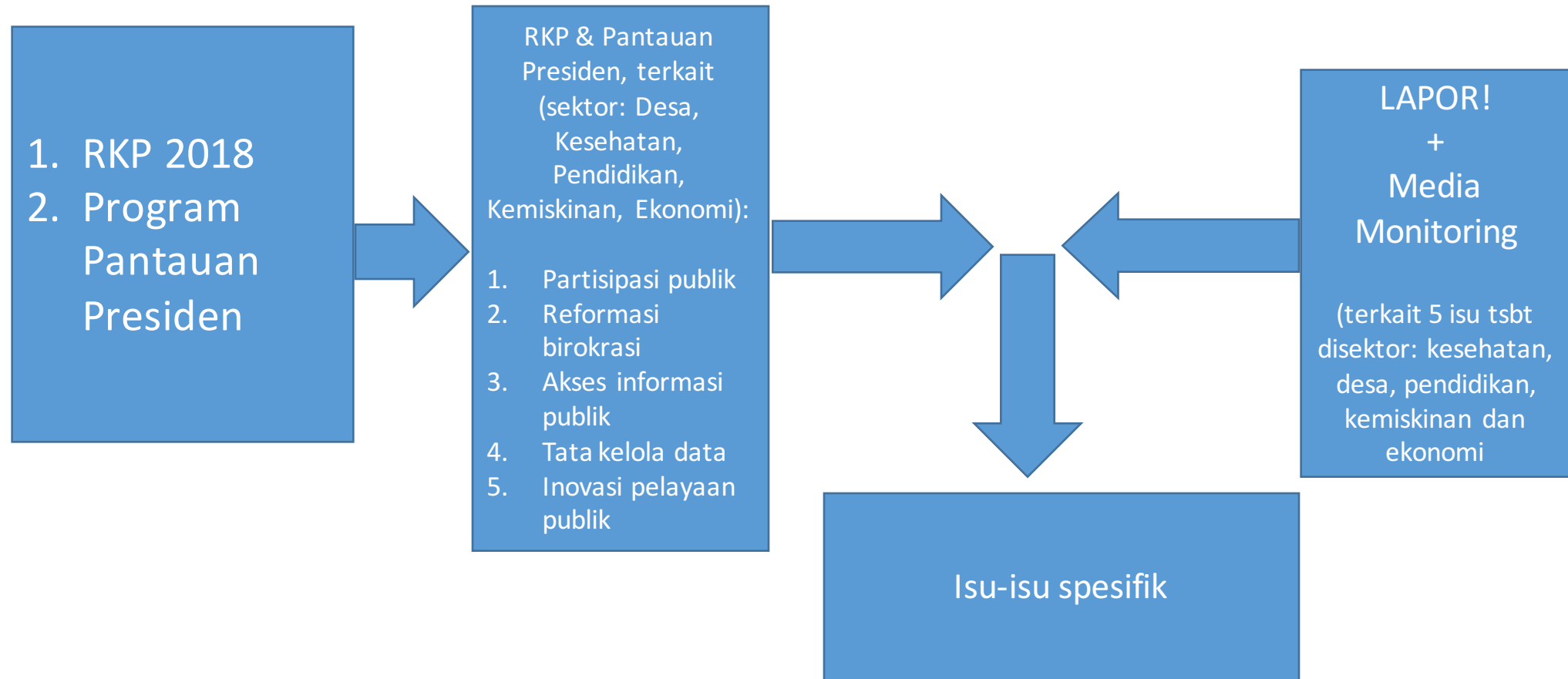


# **Kerangka Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018- 2019**

# Outline Pembahasan

- Metode Perumusan Grand Challenges
- Isu Utama Renaksi
- Timeline Pembuatan Renaksi

# Metode Perumusan Grand Challenges



\*alasan memilih lima sektor tersebut karena merupakan prioritas pembangunan pemerintah yg jg jadi tujuan dalam SDGs

# Isu Utama Renaksi

Sektor	Lingkup Isu	Isu utama
Kemiskinan	Kartu Indonesia Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola Data</li> <li>2. Akses Informasi</li> <li>3. Inovasi pelayanan publik</li> <li>4. Reformasi birokrasi: Pemanfaatan E-Government</li> <li>5. Partisipasi publik</li> </ol>
	Kartu Indonesia Pintar	
	Kartu Keluarga Sejahtera	
	Subsidi Listrik	
Pendidikan	Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru	
	Kejelasan informasi: pungutan resmi disekolah dan program bantuan dari pemerintah	
Kesehatan	Kepatuhan standard pelayanan kesehatan di RS dan Puskesmas	
Desa	Dana Desa	
Ekonomi	Perizinan Impor	

# Cross Issue

Sektor	RKP	LAPOR!	Media Monitoring	Isu
Kemiskinan	<b>Penanggulangan Kemiskinan:</b> Sasaran jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- JKN/KIS</li> <li>- Bantuan Pendidikan (KIP)</li> <li>- Bantuan pangan</li> <li>- Bantuan tunai bersyarat (PKH)</li> <li>- Subsidi energi (subsidi listrik)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. JKN/KIS yang tidak tepat sasaran, mekanisme pendaftaran tdk dipahami</li> <li>2. KIP: Tidak terdata, utk prosedur usulan2 teknis tidak terinfokan, pencairan bantuan tertunda.</li> <li>3. Penerima subsidi listrik yang tidak tepat sasaran, mekanisme yg tidak dimengerti</li> <li>4. Pembagian KKS yang tidak tepat sasaran.</li> </ol>	<p>Pendataan, pendistribusian kartu KIP, KIS, KKS, hingga pemanfaatan yang masih bermasalah.</p> <p>Penerima subsidi listrik tidak tepat sasaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KIS</li> <li>2. KIP</li> <li>3. KKS</li> <li>4. Subsidi Listrik</li> </ol>
Pendidikan	<b>Peningkatan Kualitas Guru:</b> Kesejahteraan Guru melalui tunjangan profesi guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tunjangan sertifikasi profesi guru bermasalah (pencarian tertunda)</li> </ol>	<p>Kesalahan penganggaran (data) utk penerima tunjangan, hingga ditunda penyalurannya</p>	Tunjangan sertifikasi guru
	-	Banyaknya pungutan liar di sekolah dengan alasan kebutuhan siswa	Masih banyak terjadi pungli dimana2	Transparansi dana pungutan sekolah
Kesehatan	-	Banyaknya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standard; alur layanan tdk jelas, biaya tdk jelas, fasilitas tidak lengkap dll (diberbagai daerah)	Tidak secara spesifik menemukan hal tsbt namun dibeberapa kasus di daerah mencerminkan hal yg sama	Standard Pelayanan Kesehatan
Ekonomi	<b>Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata:</b> Pengembangan ekspor barang dan jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemudahan layanan impor dan ekspor</li> <li>• Integrasi INATRADE dan INSW</li> </ul>	Mekanisme impor (yang tidak jelas dan help desk yang tdk responsif	Mekanisme impor sulit dipahami dgn keberadaan front desk yg krg paham dan responsif	Perizinan Impor (optimalisasi inatrade)
Desa	<b>Pembangunan Wilayah:</b> Pembangunan Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi: <b>Penguatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Desa</b></li> <li>• Penguatan Pemerintahan Desa: <b>Pengelolaan aset keuangan desa dan perencanaan desa, pengelolaan sistem informasi keuangan desa</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya transparansi penggunaan dana desa, memunculkan kecurigaan praktik korupsi</li> <li>2. Dibeberapa desa banyak yang merasa tidak dilibatkan dalam proses musyawarah terkait pengelolaan dana desa</li> </ol>	Kasus ketidakmampuan mengelola dana desa berujung pada praktik korupsi, dana desa belum optimal penggunaannya dll	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi dana desa</li> <li>2. Pendampingan pengelolaan dana desa</li> </ol>

# Permasalahan

No	Sektor	Isu	Permasalahan
1	Kemiskinan	Kartu Indonesia Sehat	(1) Penerima KIS tidak tepat sasaran (2) Ketidakjelasan Informasi terkait mekanisme pemanfaatan KIS
		Kartu Indonesia Pintar	(1) Penerima KIP tidak tepat sasaran (2) Ketidakjelasan informasi terkait waktu pencairan/ penyaluran dana KIP dan mekanisme partisipasi memberi usulan anak didik
		Kartu Keluarga Sejahtera	(1) Penerima KKS tidak tepat sasaran (2) Ketidakjelasan informasi terkait mekanisme pemanfaatan KKS (3) Ketidakjelasan informasi waktu pencairan KKS
		Subsidi Listrik	(1) Penerima tidak tepat sasaran & ketidakjelasan mekanisme registrasi utk mendapatkan subsidi listrik
2	Pendidikan	Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru	(1) Mekanisme pencairan yang terus tertunda tanpa penjelasan
		Kejelasan Informasi Pungutan Sekolah	(1) Praktek pungutan liar di sekolah dengan alasan kebutuhan siswa
3	Kesehatan	Kepatuhan OPD tentang standard layanan	(1) Banyak OPD di daerah yang tidak memberikan pelayanan kesehatan (RS/Puskesmas) sesuai dgn standard
4	Desa	Dana Desa	(1) Tidak adanya transparansi penggunaan dana desa oleh perangkat desa
5	Ekonomi	Perizinan Impor	(1) Ketidakjelasan mekanisme perizinan impor (2) Help Desk tidak responsif

# Timeline Penyusunan Renaksi 2018/2019

[illegible]

# Refleksi Penyusunan Renaksi Daerah 2016/2017

- Assessment Daerah
  - Indikator:
    - (1) Komitmen
    - (2) Keberadaan Reformer
    - (3) Inovasi
    - (4) Regulasi
    - (5) Kolaborasi dgn Masyarakat Sipil
- Verifikasi Lapangan
- Perumusan dan Penajaman Renaksi Daerah
- Peluncuran Renaksi



# Reminder

## **Proposed resolution by the Criteria and Standards Subcommittee to implement a commitment cap on NAPs**

*Considering the needs for including diverse issues and stakeholders and raising the ambition of commitments in OGP, the Criteria and Standards Subcommittee proposes that, beginning in 2018, the number of commitments per action plan be capped at 20 with a suggested maximum of 5 milestones per commitment. The Support Unit will continue to encourage action plans of between 5 and 15 commitments according to current guidance, and provide support to encourage specificity, relevance, ambition, and credible implementation. The Steering Committee will review the effects of the commitment cap in late 2018.*

***Jumlah Renaksi: Maksimum 20 komitmen /dengan jumlah ideal 5-15 komitmen***

TERIMAKASIH